

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Teori Legitimasi

Menurut (Aryani & Fathoni, 2024) Teori legitimasi adalah sikap teoritis yang memprediksi perilaku perusahaan dalam mengelola dan mempertahankan perspektif pemangku kepentingan utama melalui pengungkapan perusahaan. Teori ini berfokus pada interaksi organisasi dengan masyarakat dan kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Legitimacy theory dilandasi pemikiran bahwa perusahaan terikat kontrak dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya masih dalam batas ikatan dan norma masyarakat di lingkungannya. Adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya menuntut perusahaan untuk selalu tanggap akan keberadaan lingkungan dan memberikan perhatian dengan melakukan operasi yang konsisten dengan nilai-nilai lingkungan. Dengan demikian, perusahaan berusaha untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan sukarela apabila manajemen menganggap bahwa aktivitas tersebut menjadi perhatian masyarakat di sekitar perusahaan (Siladjaja et al., 2023).

Berkaitan dengan penetapan biaya lingkungan pada perusahaan yang merupakan semua pengorbanan baik finansial ataupun non finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan agar dapat menjaga kestabilan lingkungan. Dengan adanya alokasi biaya untuk pengelolaan lingkungan menunjukkan konsistensi

kepedulian lingkungan yang dilakukan perusahaan sehingga membangun kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab sosial Perusahaan (Christian et al., 2025).

1.1.2 Teori *Stackholders*

Teori *stakeholders* dikemukakan Craig Deegan (2004:371) menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaannya sendiri namun harus memberikan manfaat ataupun nilai lebih bagi stakeholdernya. Oleh karena itu, peningkatan dukungan stakeholder merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan untuk mencari dan memperluas dukungan tersebut sehingga aktifitas perusahaan dapat berjalan dengan baik guna mencapai tujuan dari perusahaan tersebut (Putri, L.G.,2023).

Teori *stakeholder* merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan sendiri saja, melainkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya seperti investor, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang terkait. Teori stakeholder dapat dikatakan sebagai salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam menjaga hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, guna mempertahankan eksistensi perusahaan (Prasetyo, 2018 dalam Suandi, A., & Ruchjana, E. T. (2021).

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan mendapat respon yang baik pula dari para investor dan *stakeholder* dan juga berdampak pada peningkatan

pendapatan perusahaan dalam jangka Panjang (Camalia, 2016). Jika dilihat pada *perspektif* teori *stakeholder*, kinerja lingkungan dan kinerja sosial dapat dianggap sebagai salah satu cara bagi perusahaan dalam melaksanakan keinginan dari berbagai *stakeholder*. Secara khusus, pada teori *stakeholder* memperlihatkan bahwa perusahaan harus mempunyai kinerja lingkungan yang baik sebab akan tercermin dan bisa berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara positif (Fahira & Yusrawati, 2023).

1.1.3 Definisi Biaya Lingkungan

1.1.3.1 Pengertian Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasional yang dilakukan Perusahaan (Hansen & Mowen, 2009) dalam Hapsoro, D., & Adyaksana, R. I. (2020).

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat adanya sistem pengelolaan lingkungan yang buruk disebabkan karena proses produksi perusahaan yang buruk. Biaya lingkungan meliputi biaya yang berhubungan dengan pengurangan proses produksi yang berdampak pada lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan dalam kegiatan perusahaan. Biaya lingkungan dapat dilihat pada alokasi dana untuk program bina lingkungan yang tercantum dalam laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Biaya lingkungan dihitung dengan

membandingkan dana program bina lingkungan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh Perusahaan (Wulaningrum & Kusrihandayani, 2020).

Menurut Hanson dan Mowen (2016:405) dalam Pratiwi, N., & Rahayu, Y. (2019) biaya lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*). Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada aktifitas pencegahan produksi limbah atau sampah pada kegiatan produksi.
2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam aktifitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk, proses, dan aktifitas lainnya pada perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan karena diproduksinya limbah dan sampah. Tujuan dari aktifitas ini adalah untuk memastikan limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar perusahaan dan untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Biaya kegagalan eksternal terbagi menjadi biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure costs*) adalah biaya yang dialami dan

dibayar perusahaan. Biaya kegagalan yang tidak dapat direalisasikan (*unrealized external failure cost*) atau biaya sosial (*societal cost*).

1.1.3.2 Pengukuran Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio biaya lingkungan (Subaida, I., & Pramitasari, T. D, 2023)

$$Rasio\ Biaya\ Lingkungan = \frac{(\sum \text{Biaya lingkungan})}{\text{Laba bersih setelah pajak}}$$

Indikator yang digunakan adalah rasio total biaya lingkungan terhadap laba bersih (Net Income). Rasio ini mencerminkan seberapa besar proporsi keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk aktivitas tanggung jawab lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencegahan polusi, dan konservasi lingkungan sebagai bentuk komitmen nyata dari perusahaan serta tidak hanya sekadar untuk kepatuhan pada regulasi saja (Manulang et al., 2026).

1.1.4 Definisi Kinerja Lingkungan

1.1.4.1 Pengertian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan fokus perusahaan dalam pelestarian lingkungan dan mengatasi masalah atas dampak negatif lingkungan yang terjadi akibat kegiatan operasi lingkungan. Hasil dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya disebut dengan kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini mengarah pada seberapa banyak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan bisnis, dimana jika kerusakan lingkungan hidup yang dihasilkan itu rendah, maka kinerja lingkungan perusahaan tersebut baik dan begitu

juga sebaliknya, jika kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan operasi lingkungan itu banyak dampak negatifnya maka kinerja lingkungan perusahaan tersebut buruk (Angelina, M., & Nursasi, E. 2021).

Kinerja lingkungan mengacu pada seberapa besar dampak dan kerusakan yang telah disebabkan oleh kegiatan bisnis perusahaan. Pembuangan limbah dan bagaimana cara pengelolaan limbah dari perusahaan sehingga mampu meminimalisir kerusakan lingkungan disekitaran pabrik dan pengelolaan produksi bisnis perusahaan. Kerusakan lingkungan yang semakin minim dianggap akan meningkatkan kinerja lingkungan dari suatu perusahaan, sedangkan semakin besar dampak kerusakan lingkungan, semakin buruk kinerja Perusahaan (Chasbiandani, T., Rizal, N., & Satria, I. (2019)

Menurut Zainab, A., & Burhany, D. I. (2020) Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Kinerja lingkungan menunjukkan hasil interaksi suatu organisasi/perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

1.1.4.2 Pengukuran Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan menunjukkan hasil interaksi suatu organisasi/perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengukur kinerja lingkungan suatu perusahaan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar penilaian yang digunakan oleh PROPER adalah

peraturan lingkungan hidup yang berkaitan dengan persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengolahan limbah pencemaran air laut, serta potensi kerusakan lahan (Zainab, A., & Burhany, D. I, 2020).

PROPER bukan pengganti instrumen penataan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penataan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance). Kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan sederhana saja. Apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan

hidup. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan:

1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya

Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.

2. Pengendalian pencemaran air

Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penaaatan yang telah ditetapkan. Pada titik penaaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameter yang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.

3. Pengendalian pencemaran udara

Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi ketentuan dalam peraturan. Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.

4. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.

5. Pengendalian Pencemaran Air Laut

Ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin.

6. Potensi kerusakan lahan

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi best mining practices, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak dikelola. Mengatur

ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan adalah kestabilan lereng. Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang setiap jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup. Membuat dan memelihara sarana pengendali erosi. Membuat sistem pengaliran (drainage) yang baik supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.

Selanjutnya yaitu kriteria penilaian lebih (beyond compliance), Kriteria beyond compliance lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi perusahaan, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER. Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond compliance adalah :

1. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.
2. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.

3. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan.
4. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besarpula nilai yang diperoleh perusahaan.
5. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah padat non B3 kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3
6. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh.
7. Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan jumlah pohon yang dinilai, tetapi lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang dikelola dan memiliki data tentang status dan kecenderungan

sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola.

8. Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam aspek ini perusahaan harus memiliki program strategis untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu. Pemetaan Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi (modal sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program community development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan dan terdapat indikator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.

Dasar penilaian ini kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah peringkat hasil yang disimbolkan dengan kategori warna mulai dari emas sebagai peringkat paling/sangat baik, kemudian hijau sebagai peringkat baik, biru sebagai peringkat

sedang, merah sebagai peringkat buruk, dan hitam sebagai peringkat paling/sangat buruk (Zainab, A., & Burhany, D. I, 2020).

Tabel 2. 1 Indikator Penilaian PROPER

Peringkat Warna	Kriteria Penilaian
Emas	untuk hasil penilaian tahap III yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
Hijau	untuk hasil penilaian tahap II yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b
Biru	untuk peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merah	untuk peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Hitam	untuk peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan

Sumber : Peraturan Kementerian LHK Nomor 1 Tahun 2021

1.1.5 Definisi Profitabilitas

1.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono (2010: 122) dalam Syamsul Bakhtiar (2020).

Menurut Rahayu (2020:20) profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

1.1.5.2 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Sartono (2010: 122) dalam Syamsul Bakhtiar (2020) secara umum terdapat 4 (empat) jenis rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Gross profit margin (GPM)

Rasio ini mengukur persentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan (Sartono 2010: 123). Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Goods Sold}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

2. Net profit margin (NPM)

Menurut Sartono (2010: 123) menyatakan bahwa Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Semakin besar net profit margin, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

$$Net Profit Margin = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

3. Return on Equity (ROE)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. karena itu rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang sebenarnya.

$$Return on Equity = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}} \times 100\%$$

4. Return on Assets (ROA)

Menurut Sartono (2010: 124) menyatakan bahwa Rasio ini disebut juga dengan rasio return on invesment (ROI). Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rasio return on assets ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut.

$$Return on Assets = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA) yaitu perbandingan laba yang diperoleh dengan investasi atau aset. Salah satu keunggulan ROA adalah sifatnya yang menyeluruh dan relevan dengan konteks biaya lingkungan dan kinerja lingkungan yang membutuhkan investasi dalam aset pengolahan limbah yang cukup besar (Zainab & Burhany, 2020).

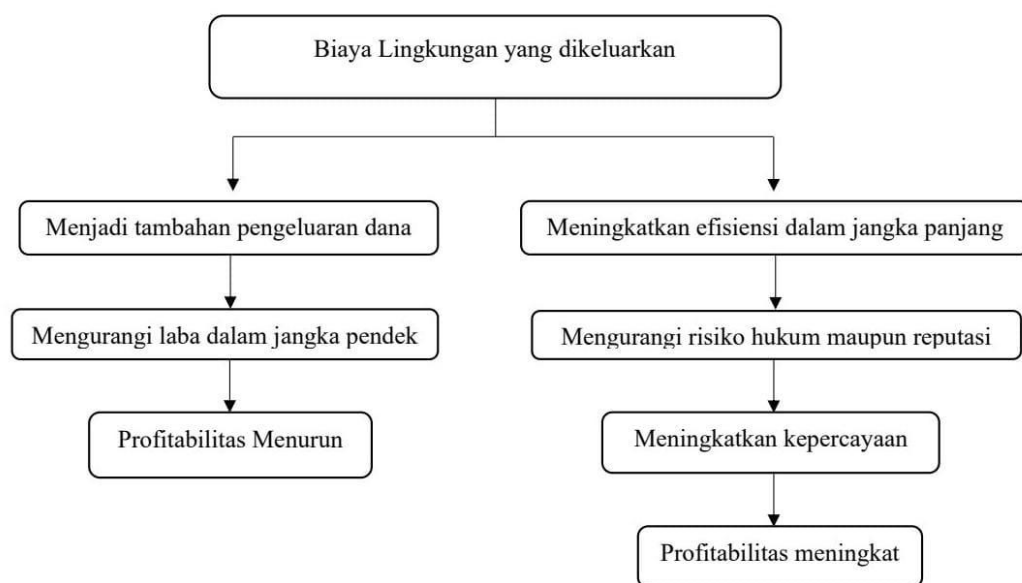
1.2 Kerangka Pemikiran

1.2.1 Pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Profitabilitas

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah kemungkinan adanya kualitas lingkungan yang buruk dan mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul disebabkan aktivitas perusahaan. Sayangnya, perusahaan menganggap bahwa biaya lingkungan ini hanyalah menjadi tambahan pengeluaran dana bagi Perusahaan (Larosa, 2023). Biaya lingkungan ini akan timbul yang nantinya bisa berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dikarenakan bengkaknya biaya yang dikeluarkan (Camilia, 2016). Adanya penambahan beban berupa biaya lingkungan akan mengurangi laba (Profitabilitas) perusahaan dimana laba sendiri merupakan salah satu parameter atau tolak ukur untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (Mulyati et. al., 2025). Dalam jangka pendek, peningkatan biaya lingkungan dapat menyebabkan penurunan profitabilitas karena biaya tersebut tidak serta-merta menghasilkan pendapatan (Wicaksono et al., 2025).

Implementasi sistem manajemen lingkungan membutuhkan alokasi dana yang cukup besar, namun dalam jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, pengeluaran yang

dialokasikan untuk menangani dampak lingkungan dari aktivitas bisnis dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan, karena hal ini akan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui reputasi yang positif (Fitriyani et al., 2024). Ketika perusahaan menerapkan environment cost dan mampu menunjukkan kinerja lingkungan yang baik melalui penyajian biaya lingkungan, maka dampaknya adalah pada kinerja keuangan yang baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan sosial dari para stakeholders seperti masyarakat dan konsumen, di mana pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan, seperti pencapaian profitabilitas perusahaan yang maksimal (Putri, L.G.,2023).

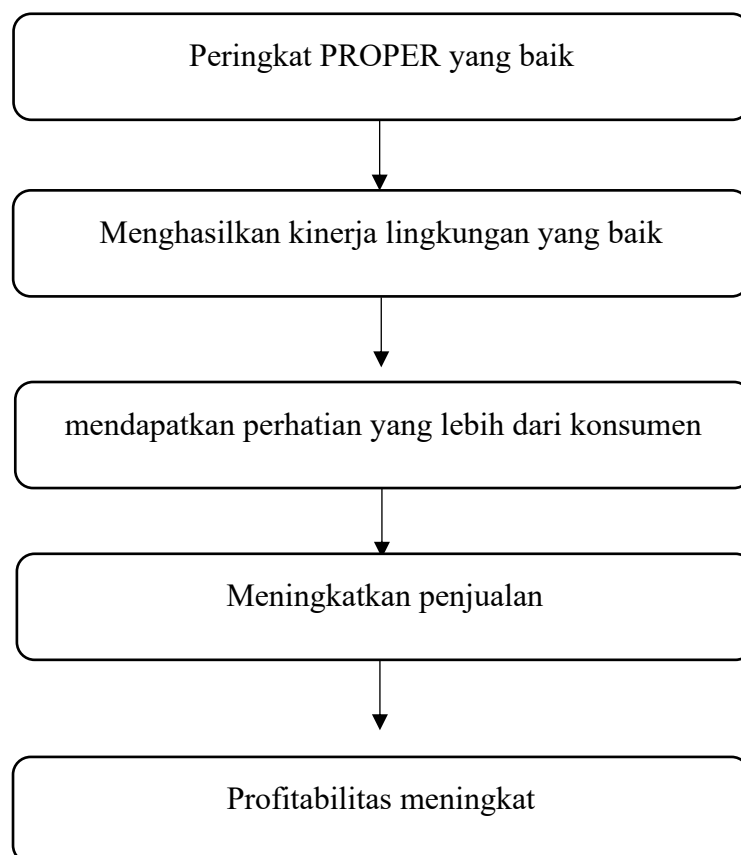


1.2.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas

Kinerja lingkungan ini dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan dan dinilai melalui peringkat PROPER. Perusahaan dengan peringkat PROPER yang baik akan memperoleh citra positif dari investor dan masyarakat (Larosa, 2025).

Perusahaan yang dapat menghasilkan kinerja lingkungan yang baik tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih dari konsumen, di mana hal ini akan mendorong kepada peningkatan penjualan produk perusahaan yang akan berdampak baik terhadap kinerja keuangan (Zainab, A., & Burhany, D. I, 2020).

Dengan meminimalkan kerusakan lingkungan perusahaan, maka Perusahaan akan memiliki kinerja lingkungan yang baik. Mengumumkan atau melaporkan kegiatan Perusahaan yang terkait dengan kinerja lingkungan sebagai cara untuk mengirimkan sinyal positif kepada pemangku kepentingan, yang mengarah pada peningkatan kinerja keuangan yang tercermin dalam peningkatan profitabilitas (Kotango et. al., 2024).



1.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu di atas, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penulis mengusulkan hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 = Biaya Lingkungan Berpengaruh terhadap Profitabilitas

H2 = Kinerja Lingkungan Berpengaruh terhadap Profitabilitas